

# **Brimob dalam Bayang Identitas Sipil Polri: Dari Show of Force ke Akuntabilitas**

**Tim CSP – Center for Strategic Policing**

## **Pendahuluan**

Sejak kelahirannya, Brigade Mobil (Brimob) menjadi salah satu kekuatan strategis di tubuh Polri. Satuan ini tumbuh dari kebutuhan tempur di masa revolusi kemerdekaan, ketika garis antara polisi dan tentara belum sepenuhnya jelas. Dalam perjalanan waktu, Brimob tetap dipertahankan sebagai pasukan elite dengan kemampuan paramiliter: latihan tempur, persenjataan berat, dan kesiapan menghadapi ancaman luar biasa. Namun, keberadaan Brimob inilah yang kerap menimbulkan dilema mendasar: sejauh mana Polri bisa meneguhkan dirinya sebagai institusi sipil, sementara di dalamnya masih bercokol satuan dengan karakteristik militeristik?

Problem identitas ini menjadi semakin penting di era demokrasi. Polri seharusnya tampil sebagai kekuatan sipil non-combatant, yang mengutamakan pelayanan,

perlindungan, dan penegakan hukum berbasis kepercayaan publik. Tetapi, wajah represif Brimob yang muncul di jalanan dalam mengatasi demonstrasi atau konflik sosial sering kali menimbulkan kesan bahwa Polri masih menyisakan “bayang-bayang militer” dalam tubuhnya. Alih-alih memperkuat legitimasi sipil, pengerahan Brimob tanpa batasan yang jelas justru memunculkan pertanyaan: apakah Polri sudah benar-benar meninggalkan warisan militeristiknya?

Dilema ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika Brimob tetap menjadi bagian dari Polri, maka ia harus melalui proses pembenahan yang serius agar keberadaannya tidak lagi mengaburkan identitas sipil Polri. Transformasi Brimob bukan sekadar soal doktrin dan persenjataan, melainkan juga soal filosofi, kultur, dan simbol.

## **Masalah Utama: Kerancuan Fungsi dan Wajah Represif Brimob**

Keberadaan Brimob dalam tubuh Polri membawa persoalan serius terkait identitas kelembagaan. Di satu sisi, Brimob sering dipandang sebagai pasukan pemukul yang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman bersenjata, terorisme, atau situasi keamanan yang berisiko tinggi. Namun di sisi lain, citra Brimob di ruang publik lebih sering hadir dalam konteks represif: membubarkan demonstrasi mahasiswa, menghadapi aksi buruh, hingga penanganan konflik

horizontal. Situasi ini menimbulkan kerancuan fungsi: apakah Brimob diproyeksikan sebagai satuan paramiliter untuk mengatasi ancaman khusus, ataukah sebagai pasukan serbaguna yang bisa diturunkan untuk segala persoalan sosial?

Kerancuan ini berbahaya. Pertama, ia membuat Polri kehilangan konsistensi sebagai institusi sipil non-combatant. Polisi yang seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis justru tampil dengan wajah militeristik—bersenjata lengkap, berbaju hitam, dan menggunakan kendaraan taktis. Kedua, pengerahan Brimob dalam situasi sipil sering kali memicu eskalasi, bukan meredakan ketegangan. Alih-alih menciptakan rasa aman, kehadiran Brimob kerap menghadirkan rasa takut.

Masalah lain adalah aspek hukum dan akuntabilitas. Fungsi kepolisian dalam demokrasi idealnya berbasis pada prinsip *minimum use of force*—kekerasan hanya digunakan sebagai jalan terakhir. Namun, dengan karakteristik paramiliter Brimob, batasan antara penegakan hukum sipil dan operasi keamanan bersenjata sering kabur. Tidak jarang, korban sipil justru berjatuh akibat pendekatan represif yang berlebihan. Akibatnya, legitimasi Polri sebagai pelindung masyarakat terganggu, dan agenda reformasi kehilangan pijakan moral.

Lebih jauh, warisan militeristik Brimob juga berpengaruh ke dalam tubuh Polri sendiri. Kultur disiplin ala tentara, pola komando vertikal, hingga simbol-simbol seremonial paramiliter memperkuat

bayangan bahwa Polri belum sepenuhnya keluar dari masa lalu ketika masih menjadi bagian dari ABRI. Hal ini membuat upaya membangun identitas sipil Polri tersendat, bahkan sering mengalami resistensi internal.

## **Belajar dari Model Brimob di Negara Lain**

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberadaan satuan paramiliter dalam kepolisian bukanlah hal yang aneh, tetapi penempatannya selalu dibatasi oleh aturan ketat dan dikendalikan oleh prinsip kepolisian sipil.

Di **Prancis**, misalnya, terdapat *Gendarmerie Nationale* yang memang berakar militer tetapi berada di bawah kendali sipil dalam banyak tugas kepolisian. Unit ini hanya diturunkan untuk operasi khusus yang melampaui kapasitas polisi sipil biasa, seperti kontra-terorisme atau penanganan kerusuhan skala besar. Untuk tugas rutin kepolisian, tetap ada kepolisian sipil (*Police Nationale*) yang menjadi wajah utama aparat keamanan. Pemisahan fungsi ini membuat gendarmerie tidak menelan identitas sipil kepolisian secara keseluruhan.

Di **Amerika Serikat**, banyak kepolisian kota memiliki SWAT (Special Weapons and Tactics), yang secara kemampuan mirip dengan Brimob. Namun, SWAT hanya digerakkan pada situasi berisiko tinggi: penyanderaan, penangkapan kartel bersenjata, atau

penembakan massal. Penggunaan SWAT sangat jarang dan selalu mendapat sorotan publik. Transparansi, prosedur hukum, dan akuntabilitas dipertegas agar tidak menimbulkan kesan bahwa polisi biasa pun bersifat “paramiliter.”

Sementara itu, di **Jepang**, tidak ada unit paramiliter yang setara dengan Brimob dalam ukuran besar. Kepolisian Jepang memang memiliki unit khusus anti-huru-hara (*Riot Police Units*), tetapi fokus utamanya bukan tempur, melainkan pengendalian massa dengan pendekatan minimal force. Ketika menghadapi ancaman serius seperti terorisme, Jepang membentuk unit kontra-terorisme skala kecil yang dilatih sangat khusus. Pola ini menunjukkan bahwa kekuatan paramiliter tidak harus besar dan mendominasi, tetapi cukup terbatas sesuai kebutuhan yang jelas.

Di **India**, terdapat *Central Reserve Police Force (CRPF)*, yang merupakan unit paramiliter besar dengan banyak cabang. Namun pengalaman India justru menunjukkan sisi gelap: sering kali CRPF digunakan untuk operasi penindasan di daerah konflik (seperti Kashmir), sehingga menimbulkan kritik keras terkait pelanggaran HAM. Dari kasus ini, dapat diambil pelajaran bahwa jika paramiliter terlalu dominan dan sering digunakan dalam situasi sipil, maka kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa runtuh.

Dari berbagai model tersebut, terlihat bahwa keberadaan unit paramiliter dalam tubuh kepolisian

bisa diterima sejauh fungsinya didefinisikan secara ketat, penggunaannya jarang dan proporsional, serta dikendalikan dengan standar hukum dan akuntabilitas publik. Polri dapat belajar dari model Prancis, AS, dan Jepang yang lebih menekankan pembatasan fungsi dan transparansi, sekaligus menjauhi jebakan seperti di India di mana paramiliter justru menjadi simbol represif negara.

## **Belajar dari Negara yang Memisahkan Polisi dan Brimob**

Selain model yang melekatkan satuan paramiliter di dalam tubuh kepolisian, ada pula negara-negara yang memilih jalan sebaliknya: **memisahkan sepenuhnya fungsi paramiliter dari polisi sipil**. Logikanya jelas – polisi harus tetap berwajah sipil, sedangkan kekuatan paramiliter ditempatkan di luar, dengan mandat dan rantai komando berbeda.

### **Pertama, Jerman – Bundespolizei vs Bereitschaftspolizei**

Di Jerman, polisi reguler (Polizei) berfokus pada pelayanan sipil. Untuk pengendalian kerusuhan besar atau operasi bersenjata, ada unit *Bereitschaftspolizei* (polisi cadangan anti huru-hara), tetapi ukurannya terbatas. Sementara itu, jika ada ancaman keamanan nasional, negara mengerahkan *Bundeswehr* (militer)

atau GSG 9 (unit khusus setara militer) yang berada di luar fungsi polisi reguler. Dengan begitu, wajah polisi sehari-hari tetap humanis, tanpa bayang-bayang paramiliter yang besar seperti Brimob.

## **Kedua, Inggris – Police vs Military Aid**

Kepolisian Inggris sangat ketat dijaga sebagai institusi sipil. Tidak ada Brimob atau gendarmerie di dalamnya. Bila muncul ancaman terorisme besar atau situasi luar biasa, negara tidak memakai “Brimob versi polisi,” tetapi meminta bantuan langsung dari militer melalui mekanisme *Military Aid to Civil Authorities* (MACA). Pemisahan ini menjaga agar polisi tetap identik dengan pelayanan masyarakat, sementara operasi bersenjata jelas berada di ranah militer.

## **Ketiga, Belanda – Polisi Sipil dan Marechaussee**

Belanda pernah menghadapi dilema serupa dengan Indonesia karena mewarisi *Koninklijke Marechaussee* (setara Brimob). Namun, solusi yang dipilih adalah menempatkan Marechaussee di bawah Kementerian Pertahanan, bukan kepolisian sipil. Fungsinya lebih dekat ke militer (perbatasan, bandara, operasi internasional). Polisi sipil Belanda (*Nationale Politie*) bebas dari wajah paramiliter, sehingga hubungan dengan warga tetap terjaga.

## **Keempat, Kanada – Polisi Sipil Tanpa Paramiliter**

Kepolisian Kanada, termasuk *Royal Canadian Mounted Police (RCMP)*, tidak memiliki unit paramiliter besar di dalam tubuhnya. Jika terjadi kerusuhan masif atau ancaman serius, negara akan melibatkan militer Kanada, bukan memperbesar unit bersenjata dalam polisi. Dengan pola ini, polisi tetap fokus pada keamanan sipil sehari-hari, sementara penggunaan kekuatan ekstra menjadi opsi terakhir melalui jalur konstitusional yang jelas.

Dari contoh-contoh ini, terlihat dua prinsip utama: Pertama, Identitas polisi sipil dijaga tetap humanis dan tidak bercampur dengan paramiliter. Kedua, Kekuatan paramiliter, jika diperlukan, ditempatkan di luar kepolisian (baik di bawah militer, kementerian pertahanan, atau mekanisme bantuan khusus).

Dengan model pemisahan ini, masyarakat bisa membedakan dengan jelas antara polisi yang menjadi mitra sehari-hari, dan pasukan khusus yang hanya muncul dalam situasi darurat nasional.

## **Arah Pembenahan Brimob: Dari Pasukan Pemukul ke Satuan Khusus yang Terkendali**

Jika Brimob tetap dipertahankan dalam tubuh Polri, maka yang paling mendesak Adalah: pertama, melakukan redefinisi fungsi. Brimob tidak boleh lagi diposisikan sebagai pasukan pemukul



yang diturunkan untuk setiap kerumunan sipil, tetapi harus dibatasi hanya untuk operasi khusus: menghadapi terorisme, mengatasi kerusakan besar yang mengancam stabilitas negara, membantu penanganan bencana, atau merespons konflik bersenjata. Dengan batasan ini, Brimob tidak lagi dipakai dalam tugas rutin kepolisian seperti patroli, pengamanan demonstrasi, atau pengendalian unjuk rasa mahasiswa.

Kedua, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Pengerahan Brimob tidak boleh hanya berdasar perintah komandan atau keputusan internal, melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap operasi Brimob harus bisa ditelusuri prosedurnya, diaudit, dan dilaporkan secara terbuka agar publik tahu alasan serta proporsionalitas penggunaannya. Transparansi semacam ini akan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuatan sekaligus memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi sipil.

Ketiga, reformasi doktrin dan latihan. Selama ini, pelatihan Brimob kerap berpusat pada kemampuan tempur dan disiplin ala militer. Itu memang tetap dibutuhkan, tetapi harus dibalut dengan doktrin baru: *sipil sebagai panglima*. Artinya, setiap kemampuan taktis Brimob harus tunduk pada nilai-nilai kepolisian sipil. Kurikulum pelatihan tidak hanya berisi teknik tempur, tetapi juga harus memasukkan materi hak asasi manusia, negosiasi konflik, komunikasi sipil, dan manajemen massa tanpa kekerasan. Dengan

orientasi ini, Brimob akan tetap tangguh secara taktis, tetapi kehadirannya tidak menakutkan atau represif bagi masyarakat.

Keempat, simbol dan seremonial Brimob juga harus direvisi. Atribut, seragam, dan pola tampil Brimob perlu disederhanakan agar lebih humanis. Brimob memang tetap satuan taktis dengan kemampuan tinggi, tetapi penampilan yang terlalu mirip militer atau pameran *show of force* berlebihan di ruang sipil hanya akan menambah jarak psikologis dengan masyarakat. Sebaliknya, simbol-simbol Brimob harus menegaskan keterikatan pada nilai pengayoman, pelayanan, dan kedekatan dengan rakyat. Misalnya dalam upacara besar Brimob, lebih baik menonjolkan kisah pengabdian anggotanya di daerah rawan, bukan parade senjata atau atraksi gaya militer.

Terakhir, pembenahan Brimob harus disertai dengan penguatan identitas Polri sipil. Wajah utama kepolisian tetap harus polisi komunitas: polisi yang hadir sehari-hari di tengah masyarakat, dekat dengan warga, dan menjadi mitra dalam menjaga keamanan. Brimob hanya tampil jika eskalasi situasi sudah melewati ambang tertentu yang memang menuntut respon taktis bersenjata. Dengan demikian, Brimob diposisikan sebagai cadangan strategis, bukan sebagai wajah pertama Polri.

Melalui redefinisi fungsi, reformasi doktrin, kontrol yang ketat, pembaruan simbolik, serta peneguhan polisi komunitas sebagai wajah utama, Brimob tetap dapat dipertahankan tanpa menggerus identitas

sipil Polri. Arah pembenahan ini menempatkan Brimob sebagai satuan khusus yang profesional dan terkendali, sekaligus memastikan bahwa marwah kepolisian sipil tetap menjadi panglima dalam sistem demokrasi Indonesia.

## Penutup

Brimob adalah warisan panjang sejarah yang lahir di masa penuh konflik bersenjata. Namun, dalam negara demokrasi modern, wajah kepolisian dituntut semakin sipil dan humanis. Di titik inilah dilema muncul: apakah Brimob tetap dipertahankan dalam tubuh Polri, ataukah harus direformasi secara mendasar?

Jika Brimob tetap di bawah institusi Polri, maka pembenahan menyeluruh menjadi keharusan: fungsi yang jelas, doktrin baru berbasis HAM, akuntabilitas ketat, simbol yang lebih humanis, dan penguatan wajah polisi komunitas sebagai garda depan. Dengan jalan ini, Brimob tidak lagi tampil sebagai “militer mini” di ruang sipil, melainkan sebagai kekuatan cadangan yang hanya hadir saat eskalasi sudah melampaui ambang normal.

Pengalaman negara lain memberi cermin: ada yang memilih melekatkan satuan paramiliter ke dalam kepolisian dengan kontrol ketat, ada pula yang memisahkan sepenuhnya agar polisi tetap bersih dari nuansa militeristik. Indonesia bisa belajar dari

keduanya, sembari menemukan model khas yang sesuai dengan konteks sosial-politik dalam negeri.

Akhirnya, inti pembenahan adalah meneguhkan Polri sebagai **institusi sipil** yang dipercaya masyarakat. Brimob—apapun bentuk pengaturannya kelak—tidak boleh mengaburkan prinsip dasar itu. Kepolisian yang humanis, transparan, dan akuntabel adalah syarat mutlak agar reformasi Polri benar-benar bermakna, bukan sekadar jargon. []